

RENJA PERUBAHAN BKPSDM

**RENCANA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
MAHAKAM ULU**



TAHUN 2024

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Lembar Cover | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iii |
| | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 7 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 8 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2024 TW II DAN CAPAIANRENSTRA | |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 TW II dan Capaian Rensra SKPD | 10 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD | 25 |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... | 27 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 28 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 28 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... | 29 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD | 30 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 4.1. Program dan Kegiatan | 31 |
| 4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM | 34 |
| BAB V PENUTUP | |
| 5.1. Kesimpulan | 46 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Semester satu 2024..... | 12 |
| Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD | 25 |
| Tabel 3.1 Rumusan Rencana Belanja SKPD Tahun 2024 | 35 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengemukakan bahwa Renja Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024;

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

1. Tahap Perumusan Rancangan Renja SKPD;

Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;
11. Pembahasan forum SKPD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

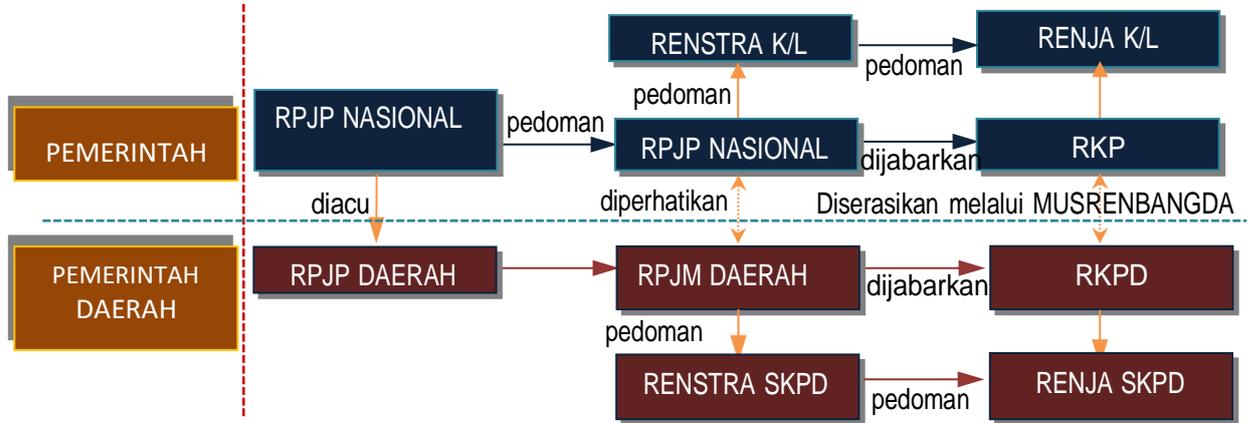
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD;

Tahap Penyajian rancangan Renja SKPD merupakan sistematis penyajian Rancangan Renja yang disiapkan dan ditetapkan untuk menguraikan perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat beserta pagu indikatifnya. Proses penyusunan Renja SKPD pada tingkatan SKPD secara garis besar meliputi :

- (1) SKPD menyusun Renja-SKPD;
- (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat;
- (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju;
- (5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antarpemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan:

Gambar 1.1. Skema Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah



Tahapan Perencanaan Pembangunan diawali dengan penyusunan rencana, pada tingkat pemerintah pusat dimulai dengan penyusunan RPJP Nasional dan dengan mempedomani RPJP Nasional kemudian disusun RPJM Nasional dan selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk RKP yang mana Rancangan RKP diserasikan melalui MUSRENBANG. Dari hasil MUSRENBANG maka Materi menyusun Rancangan Perubahan RKP dan atas dasar RKP tersebut menjadi pedoman penyusunan RABPN. Pada tingkat Kementerian/Lembaga penyusunan RENSTRA K/L mempedomani RPJM Nasional yang selanjutnya dijabarkan kedalam RENJA K/L dan penyusunan RENJA K/L diturunkan dari RKP yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.

Keterkaitan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pemerintah pusat dan K/L sangat erat kaitannya yaitu penyusunan RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional dan dari RPJP Daerah kemudian diturunkan kedalam RPJM Daerah dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional dan selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan kedalam RKP dan

seperti halnya RKP maka RKPD juga harus melalui proses MUSRENBANGDA. RPJMD dijabarkan kedalam RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan seterusnya diturunkan ke RENJA SKPD.

Dengan telah tersusunnya RPJMD, maka seluruh SKPD harus menyusun RENSTRA SKPD dengan berpedoman pada RPJMD tersebut dan selanjutnya disusun RENJA SKPD yang merupakan pelaksanaan dari RENSTRA SKPD untuk diteruskan dalam rangkaian proses seterusnya sampai dengan penyusunan RKA untuk ditetapkan menjadi DPA-SKPD. Dalam proses yang sama Pemerintah Daerah menyusun RKPD.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui proses pembahasan di internal SKPD maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappeda Kabupaten Mahakam Ulu dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang kemudian ditindaklanjuti dan dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, penyajian renja perangkat daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja SKPD disusun dengan maksud dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan terjaminnya konsistensi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah atau dokumen yang dipersamakan dengan itu.

1.3.2 Tujuan

Tersusunnya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Semester dua tahun 2024 dengan tetap menjaga konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya serta dengan dokumen anggarannya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024, meliputi :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan;

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal SKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat;

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; memuat Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta merumuskan Program dan Kegiatan yang didalamnya dirumuskan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi Kegiatan, target kinerja, Kebutuhan Dana Indikatif dan Sumber Dana dari Program dan Kegiatan SKPD yang dituangkan dalam tabel rekapitulasi program dan kegiatan;

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran yang memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD SEMESTER 1 TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Turunan Renja SKPD Tahun 2024 semester satu yang terealisasi dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), capaian Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Untuk Belanja Operasi Tahun 2024 semester satu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 14.926.611.466,-

b. Belanja Modal

Belanja Modal untuk Tahun 2024 semester satu terdiri atas Belanja Modal
Rp. 411.538.685,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu belum mempunyai indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Prima (SPM) maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengingat penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru dalam ketentuan masih mengacu RPJMD Kabupaten Induk.

Namun sampai dengan sampai saat ini belum ada kajian terhadap Standar Pelayanan Prima (SPM) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu terkait indikator kinerja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai DPA sebagai berikut :

Tabel 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2024 Januari - Juni | | |
|----|--|--------|------------------------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Jumlah Formasi seleksi Penerimaan CPNS | Orang | 200 | 76 | 38% |
| 2 | Jumlah Pemrosesan Kenaikan Pangkat | Orang | 200 | 177 | 85% |
| 3 | Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat | Orang | 200 | 200 | 100% |

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu adalah SKPD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 23 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang berdomisili di Ibukota Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu.

Jumlah Sumber Daya Manusia pendukung tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut :

1. Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan Non Stuktural

:

| Tahun 2022 | | | Tahun 2024 | | |
|--------------|----|-------|--------------|----|-------|
| Eselon II.b | 1 | Orang | Eselon II.b | 1 | Orang |
| Eselon III.a | 1 | Orang | Eselon III.a | 1 | Orang |
| Eselon III.b | 2 | Orang | Eselon III.b | 2 | Orang |
| Eselon IV.a | 8 | Orang | Eselon IV.a | 8 | Orang |
| PNS Staf | 9 | Orang | PNS Staff | 9 | Orang |
| Jumlah | 21 | Orang | Jumlah | 21 | Orang |

2. Jumlah Pegawai TNP Per 1 Januari 2024 :

S2, Tidak ada
 S1, 20 Orang
 D3, 1 Orang
 DI/SLTA, 12 Orang
 SLTP, Tidak ada
 SD, 1 Orang
 (Total 33 Orang)

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang telah direncanakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA BKPSDM) Tahun 2024 berjalan cukup baik dengan realisasi kinerja keuangan mencapai 37,58 % hal ini dikarenakan Realisasi Tahun berjalan baru pada tahap smester 1 TA 2024.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024, maka dapat disikapi beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang kepegawaian hal ini berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas berdasarkan hambatan-hambatan/permasalahan dan solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Masih banyak PNS yang perlu ditingkatkan kapasitas kompetensinya guna untuk tercapainya kinerja aparatur yang profesional dan kompeten;l
2. Sebagian besar PNS belum memahami pembuatan SKP SIAN;
3. Belum terciptanya sinkronisasi data yang baik antara pengelolaan data mutasi dan jumlah aktual PNS di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Belum memiliki sistem pendataan perubahan status pribadi PNS (Menikah, Cerai, Meninggal, melahirkan dan lain - lain);
5. Belum memiliki Pendataan secara sistem untuk data PNS yang sudah/belum mengikuti Diklat;
6. Tingkat kelulusan yang rendah dalam pelaksanaan Seleksi CPNS dan PPPK;
7. Masih adanya kasus Indislpiner PNS.
8. Masih Belum ter akomodirnya Beasiswa ASN untuk Tugas Belajar secara keseluruhan
9. Belum terakomodirnya kegiatan Kearsipan dan Bimtek Aplikasi Srikandi

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

- a. Perlu diadakan sosialisasi mengenai PP 94 tahun 2021 untuk meningkatkan pemahaman mengenai penanganan masalah yang terkait dengan Disiplin dan sanksi Pegawai Negri Sipil (PNS);
- b. Perlu diadakan Sosialisasi mengenai Peraturan Kepegawaian (Evaluasi SKP, evaluasi kinerja pegawai, Pensiun, Mutasi Pegawai dan Alih Status);

- c. Perekrutan Pegawai melalui tes CPNS/PPPK sesuai dengan kebutuhan;
- d. Pegawai BKPP perlu mengikuti Diklat/Bimtek sesuai dengan Tupoksi;
- e. Perlu adanya dukungan Terkait Kegiatan Bimtek Aplikasi SRIKANDI
- f. Dukungan Kegiatan untuk pelaporan LKjIP dan SAKIP BKPSDM

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mahakam Ulu tidak dilaksanakan disebabkan dokumen dimaksud terbatas sebagai bahan kerja oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan tidak didistribusikan ke SKPD-SKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu serta isu-isu strategis yang dihadapi tersebut diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak sebagai kapasitas untuk mengakomodir Program dan Kegiatan Masyarakat untuk dimasukkan kedalam Rencana Kerja, akan tetapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai tugas dan fungsinya merupakan pengejawantahan kepentingan publik khususnya Pegawai Negeri Sipil karena tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah melaksanakan urusan kepegawaian di tingkat daerah.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sejalan dengan arah kebijakan prioritas pembangunan nasional dan kebijakan provinsi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam RPJMD 2021-2026 pada Misi 4 : Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan visi dan misi Bupati terpilih kabupaten Mahakam Ulu Tahun (2021-2026), maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Mahakam Ulu menyusun langkah - langkah kegiatan strategis guna tercapainya penataan atau penempatan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sesuai dengan Kompetensi dan Terlaksananya Pemerintahan yang baik sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Tahun (2021-2026) Langkah - langkah Kegiatan strategis antara lain meliputi :

1. Pendataan Pegawai Negeri Sipil Secara langsung dan menyeluruh pada seluruh SKPD di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu dan melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
2. Peningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Diklat - Diklat;
3. Pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi / JPT (Assesment) yang mengacu pada sistem MERIT sesuai dengan :
 - a. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Permenpan No. 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah;
 - c. Perka BKN No. 37 Tahun 2011 tentang Pedoman penataan Pegawai Negeri Sipil.

4. Pemberian Reward/Penghargaan berupa Satya Lencana bagi Pegawai Negeri sipil yang memenuhi kriteria.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

a. Tujuan

Tujuan Renja SKPD disusun sebagai bahan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yakni :

1. Terwujudnya komposisi aparatur yang sesuai dengan beban kerja;
2. Terwujudnya tata kelola dan administrasi kepegawaian yang baik dan transparan;
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan akuntabilitas.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan yakni :

1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan pegawai;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur yang Profesional.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun Program dan kegiatan yang direncanakan pada Semester 2 Tahun 2024 terdiri dari 2(Dua) Unsur Penunjang urusan Pemerintahan, 3(tiga) Program ,11(Sebelas) Kegiatan, dan 49(empat Puluh Sembilan) Sub. Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 21 Tahun 2011, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Kepegawaian Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan:

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
- Pengelolaan Data Kepegawaian;
- Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian.

2. Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan:

- Pengelolaan Mutasi ASN;
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
- Pengelolaan Promosi ASN.

3. Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan:

- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
- Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat;
- Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional;
- Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional.

4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
- Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
- Pembinaan Disiplin ASN
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- Pembinaan Disiplin ASN;
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan:

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kab. Mahakam Ulu

Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prioritas dan penunjang tersebut diatas, diperlukan dana yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 sebesar Rp. 21.916.914.552,- yang terdiri dari :

| No. | Belanja | Anggaran |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Belanja Pegawai | Rp. 6.373.052.006,- |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 14.665.653.961,- |
| 3 | Belanja Modal | Rp. 878.208.585,- |
| JUMLAH | | Rp. 21.916.914.552,- |

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD Tahun 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kabupaten Mahakam Ulu

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | TAHUN 2024 | | | | | | | |
|------|--|------------------------------------|------------|---|---|--|--|---------------------------|---------------|------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | |
| 5 | KEPEGAWAIAN | | | | | | | | | |
| 5 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | |
| 5 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | | | 404.229.400 | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 69.193.000 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen RKA - SKPD | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 10.390.500 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen Perubahan RKA - SKPD | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 188.249.000 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | #N/A | 136.396.900 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30 Orang/Bulan | 6.021.572.006 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Dokumen | 351.480.000 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Laporan | 7.442.500 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD | Laporan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 Laporan | 6.157.800 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan I,II,III JFT/JFU, SK Peninjauan Masa Kerja, SK Pencantuman Gelar, SK KGB | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350 SK | 49.810.300 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 118.646.900 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Dokumen Sertifikat Peserta Sosialisasi dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7 Laporan dan 300 Dokumen | 149.668.500 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Perawatan Instalasi Listrik dan AC | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Perawatan | 3.426.200 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | #N/A | 133.575.000 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Pembelian ATK | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 paket | 87.568.300 | APBD |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|--|--|---------------|------|
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Persediaan barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1000 Map | 13.883.300 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Persediaan Minuman Untuk Tamu | Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bitang | 55 Dus | 24.000.000 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Koordinasi ke KORPRI Pusat Jumlah Pelaksanaan Dinas Dalam Daerah Jumlah Pelaksanaan Dinas Luar Daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat KORPRI Jumlah Pelaksanaan SKPD | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Rapat 4 Rapat | 437.666.000 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.07 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Kegiatan | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | #N/A | 121.788.300 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.07 | | Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 6.865.400 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pembelian Bahan dan Peralatan Kebersihan kantor | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25 Buah | 6.865.400 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 1.658.565.200 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 650 Lembar | 44.472.000 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | #N/A | 203.680.000 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45 Orang | 1.410.413.200 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 162.897.800 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Jumlah Pembelian BBM Kendaraan Dinas Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 Buah 10000 Liter 6 Kali | 156.397.800 | APBD |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 6.500.000 | APBD |
| 5 | 03 | 02 | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | 4.686.802.845 | APBD |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | | Penggadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | | 1.144.249.800 | APBD |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Kebutuhan Pegawai ASN Kab. Mahakam Ulu, Jumlah Kebutuhan Pegawai Daerah Non ASN | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 20.207.500 | APBD |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Formasi ASN yang Terisi | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200 Formasi | 499.999.600 | APBD |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Karis /Karsu, Jumlah Karpeg, dan Jumlah SK Pensiun | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 180 Berkas 200 Berkas 45 SK | 137.881.200 | APBD |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 08 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Kegiatan Lembaga Profesi ASN | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 199.998.100 | APBD |
| | | | | 09 | Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN | | | | 249.999.700 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Mahakam Ulu | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Kegiatan | 36.163.700 | APBD |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | | Mutasi dan Promosi ASN | | | | 687.755.200 | APBD |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah PNS Mutasi | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20 PNS | 98.177.900 | APBD |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan IV/a dan IV/b | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175 SK | 49.578.500 | APBD |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah PNS Promosi | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125 | 539.998.800 | APBD |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | | Pengembangan Kompetensi ASN | | | | 2.100.521.745 | APBD |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|--|--|--------------------|-------------|
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah Beasiswa Tugas Belajar | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 PNS | 797.569.485 | APBD |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 05 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | Terselenggaranya LATSAR CPNS Dan Terlaksananya Orientasi PPPK Jabatan Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | #N/A | 1.245.202.560 | APBD |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 14 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan IV/c | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35 SK | 50.080.300 | APBD |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 15 | Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional | Jumlah Pengurusan Jabatan Fungsional | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75 SK | 7.669.400 | APBD |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 754.276.100 | APBD |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 01 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | 1 Dokumen | 179.248.000 | APBD |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 176.691.100 | APBD |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 03 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Laporan | 188.655.500 | APBD |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | Dokumen Pengajuan ASN Berprestasi, Laporan Kegiatan, Jumlah Piagam dan Sertifikat Penghargaan bagi ASN berprestasi | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20 Dokumen, 1 Laporan, dan 6 Penghargaan | 36.475.400 | APBD |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 05 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | Dokumen Sertifikat dan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya bagi ASN | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30 Dokumen | 74.862.900 | APBD |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 07 | Pembinaan Disiplin ASN | Dokumen Absensi, Laporan Kinerja Bulanan, Dokumen Verifikasi Pengajuan TPP, Laporan Pelaksanaan Sidak Kehadiran Pegawai, Laporan Pelaksanaan Monitoring Absensi dan Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Konsultasi | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33 Dokumen, 33 Laporan, 33 Dokumen, 1 Laporan, 3 Laporan dan 5 Dokumen | 74.797.900 | APBD |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Dokumen Kasus ASN yang melakukan Pelanggaran disiplin, Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Dokumen Surat Keputusan (SK) Hukuman Disiplin dan Laporan Pelaksanaan Penyerahan SK Hukuman Disiplin | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3 Dokumen | 23.545.300 | APBD |
| 5 | 04 | | | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | 892.104.400 | APBD |
| 5 | 04 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | 892.104.400 | APBD |
| 5 | 04 | 02 | 2.02 | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | 892.104.400 | APBD |
| 5 | 04 | 02 | 2.02 | 07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Terselenggaranya Diklat bagi jabatan Fungsional, PKN Tk.II, PKA dan PKP | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | #N/A | 892.104.400 | APBD |

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|--|-----|---------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|---|----------|
| 5.03.01.2.0 1.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 69.193.000 | Jumlah Penyusunan RKA SKPD | 15 | Dokumen | 70,13 | 70,13 | 49,18 | 48.523.200 | 70,13 | 49,18 | 20.669.800 | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Suparlin |
| 5.03.01.2.0 1.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 10.390.500 | Jumlah Penyesunan Perubahan RKA SKPD | 1 | Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.390.500 | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Suparlin |
| 5.03.01.2.0 1.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 188.249.000 | Jumlah Laporan Ikhtisar | 1 | Dokumen | 18,08 | 18,08 | 3,27 | 34.041.600 | 18,08 | 3,27 | 154.207.400 | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Suparlin |
| 5.03.01.2.0 1.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 136.396.900 | Jumlah Laporan Realisasi Kinerja | 12 | Dokumen | 88,69 | 88,69 | 78,66 | 120.974.500 | 88,69 | 78,66 | 15.422.400 | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Suparlin |
| 5.03.01.2.0 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN yang tersusun | | | | | | | | | | | |
| 5.03.01.2.0 2.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 7.442.500 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.442.500 | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Suparlin |
| 5.03.01.2.0 2.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 6.157.800 | Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD | 2 | Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.157.800 | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Suparlin |
| 5.03.01.2.0 5 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.01.2.0 5.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 49.810.300 | Jumlah Dokumen Kenaikan Pangkat Golongan II dan III, Penambahan Masa Kerja, dan Pencantuman Gelar | 150 | SK | 93,72 | 93,72 | 87,83 | 46.681.140 | 93,72 | 87,83 | 3.129.160 | Sub Bid. Kependidikan | Laden |
| 5.03.01.2.0 5.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 118.646.900 | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 5 | Dokumen | 46,41 | 46,41 | 21,54 | 55.060.000 | 46,41 | 21,54 | 63.586.900 | Sub Bid. Penilaian Evaluasi Kinerja Aparatur (PEKA) | Alikhan |

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|---|----|---------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|---|------------------|
| 5.03.01.2.0 8.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 44.472.000 | Tersedianya Laporan Penyediaan Materai | 1 | Laporan | 91,57 | 91,57 | 83,85 | 40.722.000 | 91,57 | 83,85 | 3.750.000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Suparlin |
| 5.03.01.2.0 8.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 203.680.000 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | Laporan | 5,16 | 5,16 | 0,27 | 10.500.000 | 5,16 | 0,27 | 193.180.000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Suparlin |
| 5.03.01.2.0 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.01.2.0 9.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 156.397.800 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 | Unit | 11,95 | 11,95 | 1,43 | 18.691.402 | 11,95 | 1,43 | 137.706.398 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Suparlin |
| 5.03.01.2.0 9.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 6.500.000 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 23 | Unit | 40,00 | 40,00 | 16,00 | 2.600.000 | 40,00 | 16,00 | 3.900.000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Suparlin |
| 5.03.02 | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.02.2.0 1 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.02.2.0 1.02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 20.207.500 | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 1 | Dokumen | 82,26 | 82,26 | 67,67 | 16.623.200 | 82,26 | 67,67 | 3.584.300 | Sub Bid. Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Informasi | M. Rizwan Rianda |
| 5.03.02.2.0 1.03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 499.999.600 | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 1 | Dokumen | 44,61 | 44,61 | 19,90 | 223.066.220 | 44,61 | 19,90 | 276.933.380 | Sub Bid. Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Informasi | M. Rizwan Rianda |
| 5.03.02.2.0 1.06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 137.881.200 | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi | 1 | Dokumen | 42,36 | 42,36 | 17,95 | 58.409.400 | 42,36 | 17,95 | 79.471.800 | Sub Bid. Pengadaan, Pemberhentian, Data | M. Rizwan Rianda |

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------|--|-----|----------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|---|--------------------------|
| | | | Pemberhentian | | | | | | | | | | dan Informasi | |
| 5.03.02.2.0 1.08 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | 199.998.100 | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 1 | Kegiatan | 73,24 | 73,24 | 53,64 | 146.478.277 | 73,24 | 53,64 | 53.519.823 | Sub Bid. Kepegawaian | Laden |
| 5.03.02.2.0 1.09 | Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN | 249.999.700 | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN | 1 | Dokumen | 80,96 | 80,96 | 65,55 | 202.410.965 | 80,96 | 65,55 | 47.588.735 | Sub Bid. Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Informasi | M. Rizwan Rianda |
| 5.03.02.2.0 1.10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 36.163.700 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 | Dokumen | 3,59 | 3,59 | 0,13 | 1.299.000 | 3,59 | 0,13 | 34.864.700 | Sub Bid. Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Informasi | M. Rizwan Rianda |
| 5.03.02.2.0 2 | Mutasi dan Promosi ASN | | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.02.2.0 2.01 | Pengelolaan Mutasi ASN | 98.177.900 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 10 | Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 98.177.900 | Sub Bid. Mutasi dan Promosi | Remon |
| 5.03.02.2.0 2.02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 49.578.500 | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Golongan IVa dan IVb | 100 | SK | 94,07 | 94,07 | 88,48 | 46.636.490 | 94,07 | 88,48 | 2.942.010 | Sub Bid. Kepegawaian | Laden |
| 5.03.02.2.0 2.03 | Pengelolaan Promosi ASN | 539.998.800 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 3 | Dokumen | 72,92 | 72,92 | 53,17 | 393.770.690 | 72,92 | 53,17 | 146.228.110 | Sub Bid. Mutasi dan Promosi | Remon |
| 5.03.02.2.0 3 | Pengembangan Kompetensi ASN | | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.02.2.0 3.04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 797.569.485 | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | 50 | Orang | 10,57 | 10,57 | 1,12 | 84.326.202 | 10,57 | 1,12 | 713.243.283 | Sub Bid. Mutasi dan Promosi | Remon |
| 5.03.02.2.0 3.05 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | 1.245.202.560 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat | 1 | Dokumen | 29,01 | 29,01 | 8,42 | 361.294.481 | 29,01 | 8,42 | 883.908.079 | Sub Bid. Diklat | William Weno Kisworojati |

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|--|----|-------|-------|-------|-------|----------------------|--------------|-------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.02.2.0 2 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.02.2.0 2.07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 892.104.400 | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 18 | Orang | 36,71 | 36,71 | 13,48 | 327.491.800 | 36,71 | 13,48 | 564.612.600 | Sub Bid. Diklat | William Weno Kisworojati | |
| | | 15.338.150.151 | | | | 46,13 | | 0,00 | 7.076.254.532 | 46,13 | 21,28 | 8.261.895.619 | | | |

**Rumusan Rencana Penambahan Pagu Belanja Perubahan SKPD Tahun 2024
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Rumusan evaluasi penambahan pagu pada APBD-P Badan kepegawaian dan pengembangan sumber Daya manusia meliputi 29 kegiatan antara lain;

| NO | Nama Sub Kegiatan | Pagu APBD Murni 2024 | Pagu Usulan Perubahan 2024 | Keterangan | Bertambah Berkurang |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|
| 1 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 188.655.500 | 258.529.500 | Koordinasi Peneyelesaian masalah aplikasi E-kinerja BKN | 192.674.000 |
| 2 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 176.691.100 | 169.011.100 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 52.240.000 |
| 3 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | 118.646.900 | 243.126.900 | Monitoring terkait kendala penerpan aplikasi E-Kinerja BKN pada Akun ASN | 121.980.000 |
| 4 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 499.999.600 | 728.522.700 | Tahapan Persiapan Pengadaan Test CPNS & PPPK estimasi pada Bulan Juli 2024 | 228.523.100 |
| 5 | Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional | 50.080.300 | 273.965.900 | Anggaran pada APBD murni belum mengcover kegiatan secara keseluruhan, sehingga masih adanya kegiatan yang belum terlaksana antara lain undangan FGD dari BKN pusat dan BKD Provinsi terkait evaluasi kenaikan pangkat golongan IV di setiap periode | 223.885.600 |
| 6 | Pendataan Dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 49.810.300 | 185.120.600 | Anggaran pada APBD murni belum mengcover seluruh kegiatan, adapun kegiatan belum tercover antara lain : Mengikuti sosialisasi terkait peraturan KGB, kegiatan coaching klinik terkait pengusulan Peninjauan Masa Kerja Dan Pencantuman Gelar Akademik, serta Konsultasi secara langsung ke PIC Kanreg VIII jika ada permasalahan sistem aplikasi | 135.310.300 |
| 7 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | 199.998.100 | 715.217.200 | Anggaran APBD Murni belum mengcover kegiatan PORPROV KORPRI III di Kabupaten PPU yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2024. Kabupaten Mahakam Ulu akan mengikuti beberapa cabor antara lain : Futsal, Bulutangkis, Catur, Tenis Lapangan dan Tenis Meja | 515.219.100 |

| | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|---|-------------|
| 8 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 49.578.500 | 211.352.700 | Anggaran pada APBD Murni belum mengcover seluruh kegiatan, adapun kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal antara lain: menghadiri undangan FGD Evaluasi Kenaikan Pangkat yang rutin dilaksanakan setelah usulan di verifikasi BKN yang mana periode kenaikan pangkat per tahun 2024 menjadi 6 kali dalam 1 Tahun, Mengikuti Coaching Klinik terkait perhitungan PAK integrasi dan Konversi yang dilaksanakan oleh Kanreg VIII Banjarmasin, serta melakukan konsultasi secara langsung dengan PIC terkait kendala sistem Aplikasi | 161.774.200 |
| 9 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 797.569.458 | 932.898.300 | Untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap ASN yang menerima Beasiswa Tugas belajar | 230.049.000 |
| 10 | Pengelolaan Promosi ASN | 539.998.800 | 906.936.800 | Melakukan koordinasi dan Konsultasi di Kemendagri terkait kekosongan Jabatan | 366.938.000 |
| 11 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 892.104.400 | 2.020.649.500 | 1. Terdapat Kekurangan Anggaran Pada Biaya Kontribusi diklat sesuai dengan Perencanaan Diklat Tahun 2024 2. Terdapat Kegiatan yang belum tercover pada APBD Murni yaitu mengisi acara kesenian pada kegiatan rakor BKN di Bekasi dan Balikpapan | 556.760.100 |
| 12 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat | 1.245.202.560 | 1.448.661.200 | 1. Terdapat kekurangan anggaran pada Rekening Makan Minum Peserta Diklat 2. Tidak teranggarkan Biaya Honorarium Tenaga Pengajar Diklat 3. Terdapat Kekurangan Anggaran pada Rekening Sewa Gedung Diklat 4. Masih terdapat kegiatan yang belum terlaksana dalam perencanaan kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi Tahun 2024 | 203.458.640 |

| | | | | | |
|----|---|------------|-------------|--|-------------|
| 13 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 69.193.000 | 188.249.000 | Untuk Mengakomodir Anggaran Kegiatan Pelaksanaan, Workshop/Bimtek/Pendampingan tentang Perencanaan dan Lapopran Kinerja OPD s/d TW IV TA 2024 yang belum tercover Pada Anggaran Murni | 119.056.000 |
| 14 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | 23.545.300 | 51.822.400 | Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Izin Perceraian merupakan kegiatan yang mengakomodir ASN yang hendak mengurus izin perceraian. kegiatan ini menjadi kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan mengingat selalu ada ASN yang mengurus izin perceraian sehingga dirasa perlu untuk dilakukan penambahan anggaran untuk memudahkan pelayanan. | 28.277.100 |
| 15 | Pembinaan Disiplin ASN | 74.862.900 | 110.761.600 | Kegiatan Pembinaan Disiplin merupakan kegiatan yang berfokus pada pembinaan ASN, pencegahan pelanggaran disiplin dan peningkatan disiplin ASN melalui beberapa tugas seperti konseling permasalahan ASN, Sidak Kehadiran Pegawai dan Penertiban Absensi baik manual maupun fingerprint. kegiatan ini perlu dilakukan penambahan anggaran mengingat kegiatan ini selalu berjalan tiap bulan nya dan merupakan kegiatan wajib. | 35.898.700 |
| 16 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 74.797.900 | 343.094.100 | Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN merupakan kegiatan utama pada subbidang DPPKA, bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, profesionalitas dan kode etik ASN maka dianggap perlu untuk dilakukan penambahan anggaran pada kegiatan ini, mengingat banyaknya laporan pelanggaran disiplin yang harus ditindaklanjuti. yang mana kegiatan ini juga harus berkordinasi dengan pengadilan dan BKN pusat maupun BKN kanreg | 268.296.200 |

| | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|---|-------------|
| 17 | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai | 36.475.400 | 72.623.600 | Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa merupakan kegiatan rutin tiap tahun dalam rangka mengapresiasi ASN yang telah mengabdikan bagi pemerintah Republik Indonesia selama 10, 20 dan 30 tahun. Pengajuan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu periode agustus dan desember. perlunya kegiatan ini dilakukan penambahan karena akan ada pengajuan SLKS untuk periode desember yang harus dikordinasikan langsung dengan kemendagri dan setmil pusat. | 36.148.200 |
| 18 | Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi | 249.999.700 | 458.792.100 | Kegiatan Perumusan Bahan kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi merupakan kegiatan yang menanungi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan TPP Pemerintah Daerah ke Kemendagri. untuk itu maka dirasa perlu untuk dilakukan penambahan anggaran agar pengajuan TPP pemerintah daerah Melalui BKPSDM ke Kemendagri dapat terakomodir | 208.792.400 |
| 19 | Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan | 149.668.450 | 259.146.600 | Bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan pemenuhan tugas dan fungsi pada sub bidang disiplin penghargaan, dan pengembangan kompetensi aparatur, maka kegiatan sosialisasi peraturan perundang - undangan sangat penting untuk dilaksanakan. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan dianggap penting untuk dilakukan penambahan anggaran dikarenakan memasuki tahun politik dimana harus melaksanakan sosialisasi netralitas ASN | 109.478.150 |
| 20 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 87.575.500 | 113.443.300 | Kegiatan dilakukan penambahan untuk menyesuaikan pemakaian dan kegunaan pada Tahun Anggaran 2024 | 25.867.800 |
| 21 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 203.680.000 | 220.180.000 | Kegiatan dilakukan penambahan untuk menyesuaikan pemakaian dan kegunaan pada Tahun Anggaran 2024 | 16.500.000 |

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

| | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|--|---------------|
| 22 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 437.666.000 | 1.046.485.000 | Kegiatan dilakukan penambahan untuk menyesuaikan pemakaian dan kegunaan pada Tahun Anggaran 2024 | 608.819.000 |
| 23 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 133.575.000 | 600.244.900 | Kegiatan dilakukan penambahan untuk menyesuaikan pemakaian dan kegunaan pada Tahun Anggaran 2024 | 466.669.900 |
| 24 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 13.883.300 | 48.880.300 | Kegiatan dilakukan penambahan untuk menyesuaikan pemakaian dan kegunaan pada Tahun Anggaran 2024 | 27.681.600 |
| 25 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.021.572.006 | 6.021.571.902 | Perubahan Penyesuaian Kenaikan Gaji ASN BKPSDM TA 2024 | - 104 |
| 26 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 24.000.000 | 34.080.000 | Kegiatan dilakukan penambahan untuk menyesuaikan pemakaian dan kegunaan pada Tahun Anggaran 2024 | 10.080.000 |
| 27 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 48.007.800 | 59.600.000 | Kegiatan dilakukan penambahan untuk menyesuaikan pemakaian dan kegunaan pada Tahun Anggaran 2024 | 11.592.200 |
| 28 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 156.397.800 | 182.890.000 | Kegiatan dilakukan penambahan untuk menyesuaikan pemakaian dan kegunaan pada Tahun Anggaran 2024 | |
| 29 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0 | 1.286.143.600 | Untuk Meng Akomodir Kegiatan Bimtek Aplikasi Srikandi | 1.286.143.600 |

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 merupakan dokumen yang secara substansial adalah penerjemahan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Disamping itu, Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA) tahun 2024.

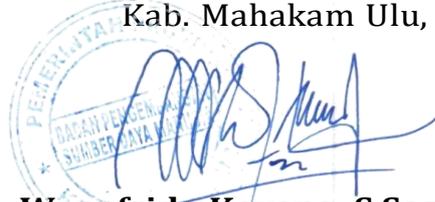
Rencana Kerja (Renja SKPD) ini merupakan gambaran program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 smester dua untuk mendukung program pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Belanja | Anggaran |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Belanja Pegawai | Rp. 6.373.052.006,- |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 14.398.940.346,- |
| 3 | Belanja Modal | Rp. 878.208.585,- |
| JUMLAH | | Rp. 21.650.200.937,- |

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan tugas di tahun 2024, sehingga kedepan diharapkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan menjadi optimal dengan ditunjang oleh pendanaan yang memadai. Atas perhatian dan dukungan semua pihak diucapkan terima kasih.

Ujoh Bilang, 15 Juli 2024 Kepala

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kab. Mahakam Ulu,

A circular official stamp in blue ink is partially visible behind a handwritten signature. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU" and "BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA". The signature is written in blue ink over the stamp.

Wenefrida Kayang, S.Sos, M.Si

NIP. 19650914 198811 2 001